

Revitalisasi Alun-alun di Jawa Barat Dongkrak Perekonomian Warga

BANDUNG (IM)- Sejumlah kota dan kabupaten di Jawa Barat memiliki wajah baru di pusat kotanya. Hadirnya Alun-alun berkonsep modern yang dipadukan dengan kearifan lokal di setiap daerah diyakini akan mempercantik wajah wilayah tersebut.

Keberadaan Alun-alun yang lebih tertata pun akan semakin banyak menarik kunjungan masyarakat. Bahkan, tidak sedikit warga dari luar kota bahkan luar provinsi, berekreasi menikmati fasilitas umum yang sebagian besarnya diarsiteki langsung Gubernur Ridwan Kamil.

Menurut Ridwan Kamil, pada 2022 ini setidaknya ada penataan enam alun-alun yang akan diremikannya, yakni Alun-alun Sukabumi, Alun-alun Garut, Alun-alun Kabupaten Kuningan, Alun-alun Keraton Kasepuhan Cirebon yang diberi nama Sangkala Buana, Alun-alun Pangbaga menjadi ikon baru Kabupaten Pangandaran, dan Alun-Alun Kota Bekasi. Pada tahun ini, Kang Emil, panggilan akrabnya, menargetkan revitalisasi Alun-alun Karawang dengan anggaran sekitar Rp20 miliar.

“Sementara revitalisasi Alun-alun Kabupaten Bekasi dilakukan dengan alokasi anggaran Rp8,9 miliar. Semoga revitalisasi Alun-alun semakin membahagiakan warga sebagai wujud kasih sayang dari para pemimpinnya, baik gubernur maupun bupati dan wali kota,” katanya, Rabu (28/9).

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Jabar, Wahyu Mijaya menambahkan revitalisasi alun-alun diharapkan bisa mendorong perekonomian masyarakat. Selain itu, Alun-alun menjadi ruang silaturahmi. “Dampak dari sisi kesehatan, kebahagiaan dan berbagai hal lainnya, bisa muncul dari ruang publik. Itu mengapa alun-alun dihadirkan,” ujar Wahyu.

Setelah rampung direvitalisasi, kata Wahyu, pengelolaan Alun-alun selanjutnya, diserahkan kepada pemerintah kota dan kabupaten. “Diharapkan masyarakat juga bisa turut berkontribusi dalam menjaga fasilitas-fasilitas yang ada. Karena yang menikmati ruang publik ini, ya masyarakat itu sendiri,” tandasnya. ● **pra**

Dishub Kota Bogor Didorong Rampungkan JPO di kawasan Padat Lalu Lintas

BOGOR (IM)- Wakil Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Bogor, Suprianto Siburian mendorong Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor merampungkan pembangunan dua Jembatan Penybrangan Orang (JPO) di lokasi yang padat lalu lintas.

Adapun dua JPO yang didesak KNPI Kota Bogor untuk segera dirampungkan pembangunannya, yakni di depan Masjid Raya atau Masjid Agung Al Mi'raj dan di Warung Jambu. Hal ini dimaksudkan agar keselamatan dan keamanan bagi pejalan kaki terjamin. “Tentunya JPO merupakan fasilitas bagi pejalan kaki untuk menyeberangi jalan dengan menggunakan jembatan. Dengan begitu, pejalan kaki dan lalu lintas kendaraan dapat dipisahkan secara fisik agar tidak saling mengganggu. Dengan JPO ini, keselamatan dan keamanan bagi pejalan kaki akan lebih terjaga,” ungkap Suprianto, Rabu (28/9).

Suprianto melanjutkan, keberadaan JPO mudah ditemukan di kawasan yang lalu lintasnya padat kendaraan. Pejalan kaki menggunakan JPO sudah diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, pasal 132 ayat 2 butir (b). Pejalan kaki wajib menyeberang di tempat yang telah ditentukan (dalam hal ini JPO).

“Aturan ini untuk keselamatan bagi pejalan kaki, karena keselamatan menggunakan jalan adalah hal yang utama. Karena itu sudah kewajiban bagi pemerintah menyediakan JPO, maka segera rampungkan pembangunannya.

Terlebih konsepnya katanya menarik, Instagramable. Mudah-mudahan menarik agar masyarakat mau nybrang pakai JPO,” terang pemuda yang akrab disapa Anto.

Anto menjelaskan, tentunya dengan adanya dua JPO ini keselamatan anak-anak sekolah menyeberang jalan terjamin, diketahui didekat titik dua JPO itu ada sekolah-sekolah. Meski ada zebra cross, tetapi JPO ini kan lebih aman.

“Pun dengan JPO ini lebih cepat, karena tidak perlu menunggu lalu lintas sepi untuk menyeberang. Mudah-mudahan pembangunan cepat selesai agar nantinya bisa digunakan para pelajar dan masyarakat umum tentunya,” jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor, Eko Prabowo, menyebutkan, ada dua lokasi untuk pembangunan JPO merupakan program yang sudah lama direncanakan, namun baru di pertengahan 2022 bisa terealisasi. JPO akan dibangun di titik-titik lokasi yang memiliki kepadatan arus lalu lintas tinggi, sehingga pembangunan JPO sangat dibutuhkan bagi pelayanan masyarakat. “Dua lokasi yang akan dibangun JPO memiliki kepadatan lalu lintas penyebrangan, baik di depan Masjid Agung Al Mi'raj ataupun di Warung Jambu. Pembangunan JPO mulai dibangun pada awal bulan Agustus 2022. ● **gio**



IDN/ANTARA

WORKSHOP KAB. BOGOR LAYAK ANAK

Workshop dan evaluasi Kabupaten Bogor Layak Anak (KLA) di Bogor, Jawa Barat.

Penganiaya Wartawan, Serang Balik dengan Laporan Penyebaran Berita Bohong

KARAWANG (IM)-Pembka Karawang bernisial AA yang jadi terduga terlapor penganiayaan wartawan melaporkan balik korban dengan dugaan penyebaran berita bohong ke Polres Karawang. Seperti diketahui, AA dilaporkan korban Gusti Sevta Gumilar dalam kasus dugaan penculikan dan penganiayaan terhadap dirinya yang merupakan seorang wartawan di kabupaten karawang.

“Kami melapor ke Polres Karawang karena (Gusti Sevta Gumilar) menyampaikan kabar bohong, sebagaimana diatur dalam pasal 14 KUHP,” kata salah satu tim kuasa hukum AA, Yonathan A. Baskoro, dalam keterangannya di Karawang, Rabu (28/9).

Yonathan mengatakan kliennya mengambil langkah projustitia agar penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Karawang bisa lebih objektif dan melihat perkara itu secara utuh.

Menurut ia, ada hal yang melatarbelakangi peristiwa itu dan meminta ada objektivitas dalam pemberitaan, walaupun sebenarnya sudah terlambat karena sudah ada aksi-aksi solidaritas wartawan di berbagai daerah.

Anggota tim kuasa hukum lainnya, Eka Prasetya, menyebutkan kalau Gusti Sevta Gumilar (29) menyampaikan kabar bohong karena dalam peristiwa itu sebenarnya tidak ada ancaman, penyekapan, dan pemaksaan mi-

num air kencing terhadap Gusti.

Ia juga mengesakan jika peristiwa itu sama sekali tidak berkaitan dengan pemberitaan atau karya jurnalistik. Dilihat dari kronologisnya, peristiwa itu terjadi berawal dari postingan provokatif di media sosial oleh Zaenal soal Persika 1951. “Klien kami sebagai orang yang bertanggung jawab bernisiatif kembali ke lokasi, di situ (lokasi Askab PSSD) sudah ada Gusti. Jadi, bukan klien kami dulu yang ada di lokasi,” kata Eka.

Menurut Simon Fernando Tambunan, anggota tim kuasa hukum AA lainnya, insiden di salah satu ruangan Stadion Singaperbangsa yang menjadi lokasi penyekapan dan penganiayaan itu bukan oleh dan seizin kliennya.

Saat itu di lokasi, Gusti yang menawarkan diri untuk menjemput Zaenal di rumahnya. “Orang berada di bawah komando AA itu tidak ada yang melakukan perbuatan melawan hukum karena sudah terprovokasi. Kira-kira itu yang sebenarnya terjadi,” kata Simon.

“Ucapan dia di publik yang menimbulkan huru-hara itu yang kami laporkan,” tambah Simon. Simon menambahkan kliennya melaporkan balik kasus itu karena kabar yang tersiar menimbulkan tekanan psikologis kepada AA dan juga anak-anaknya. Apalagi keterangan yang disampaikan Gusti tidak benar dan masuk kategori kabar atau informasi bohong. ● **pra**

8 | Nusantara



IDN/ANTARA

GUBERNUR JABAR BERTEMU KORBAN PERUNDUNGAN

Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil saat bertemu dengan siswa SD asal Kabupaten Bandung, Lael Rizki Ramadhan (11 tahun), yang jadi korban perundungan oleh teman sekolahnya, di Gedung Sate Bandung.

Pengukuran Lahan Selesai, Proyek Jalan Tol Getaci Segera Dimulai

Tol Getaci ini salah satu proyek strategis nasional (PSN). Tol ini melintasi dua provinsi yaitu Provinsi Jabar sepanjang 171,40 kilometer dan Provinsi Jateng sepanjang 35,25 kilometer dengan total panjang 206,65 kilometer.

SOREANG (IM)

Proyek nasional jalan tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap (Getaci) akan segera dimulai pengukurannya. Getaci akan menjadi jalan tol terpanjang di Indonesia yakni sepanjang 206,65 kilometer melintasi Jawa Barat

dan Jawa Tengah.

Guna mempercepat pembangunan proyek strategis nasional ini Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Bandung, telah merampungkan pengukuran

peta bidang tanah yang akan terkena jalur tol.

“Kami baru saja menyelesaikan pengukuran peta bidang. Pengerjaannya kurang lebih satu bulan. Alhamdulillah pengukuran bisa lebih cepat karena menggunakan alat ukur GPS yang memiliki metode real time kinemetik (RTK) dan fotogrametri. Sekarang sudah kami laksanakan kepada Satgas B,” kata Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor ATR/BPN Kabupaten Bandung, Nurul Huda, di Soreang, Rabu (28/9).

Dikatakan Nurul, tahap selanjutnya adalah verifikasi luas hasil pengukuran. Kemudian diumumkan di desa-desa yang lahannya akan digunakan

sebagai jalur tol Getaci itu. Tujuannya, jika ada warga pemilik lahan yang merasa keberatan terkait luasan dan batas bisa segera ditangani.

“Di wilayah Kabupaten Bandung ini terdapat 350 hektar lahan dengan 3.434 bidang lahan yang tersebar di 27 desa di enam kecamatan. Nah jika telah selesai pengumuman di desa-desa, tahap selanjutnya adalah pembayaran uang pengani kepada para pemilik lahan,” ujarnya.

Untuk diketahui, Tol Getaci ini salah satu proyek strategis nasional (PSN). Tol ini melintasi dua provinsi yaitu Provinsi Jabar sepanjang 171,40 kilometer dan Provinsi Jateng sepanjang 35,25 kilometer dengan

total panjang 206,65 kilometer.

Tol tersebut terdiri dari 4 seksi yakni Seksi 1 Junction Gedebage-Garut Utara sepanjang 45,20 kilometer, seksi 2 Garut Utara-Tasikmalaya sepanjang 50,32 kilometer, seksi 3 Tasikmalaya-Patimuan sepanjang 76,78 kilometer, dan seksi 4 Patimuan-Cilacap sepanjang 34,35 kilometer.

Pembangunan jalan tol dengan nilai investasi Rp 56 triliun ini terbagi dalam dua tahap. Tahap pertama Gedebage-Tasikmalaya yang rencananya dimulai pada 2022 dan selesai di 2024, sementara tahap kedua Tasikmalaya-Cilacap dimulai pada 2027 dan selesai di 2029. ● **pra**

Gubernur Jabar Bentuk Satgas Anti Perundungan

BANDUNG (IM)- Gubernur Jawa Barat, M Ridwan Kamil membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti Perundungan, sebagai bentuk kepedulian atas kasus-kasus perundungan yang terjadi di Jawa Barat. Operasional dari Satgas Anti Perundungan Jabar berada di bawah Pemprov Jabar bersama dengan Jabar Quick Response (JQR).

“Jadi program ini merupakan atensi langsung dari Pak Gubernur Ridwan Kamil, nantinya akan dilaksanakan mulai dari advokasi, edukasi dan konseling,” kata Koordinator Satgas Anti Perundungan Jabar Quick Response (JQR), Rini Marlina, di Bandung, Rabu (28/9).

Untuk kedepannya, kata Rini, JQR bersama Dinas Pendidikan Provinsi Jabar akan melakukan sosialisasi kepada sekolah-sekolah yang melibatkan guru-guru BP se-Jawa Barat, terkait Satgas Anti Perundungan ini.

Dia berharap kejadian perundungan yang marak terjadi di Jawa Barat ini tidak terulang kembali dan menjadi perhatian khusus untuk para guru dan orang tua. Menurut Rini sampai saat ini JQR terus mendapatkan laporan perihal perundungan dari masyarakat.

“Semenjak tahun 201, JQR telah merespons aduan yang berkaitan dengan kasus perundungan, dengan banyaknya aduan yang masuk maka akan kita respon dengan sangat serius,” katanya.

Lael Rizki Ramadhan (11), siswa SD korban perundungan oleh teman sekolahnya mendapatkan perhatian dari Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

Rizki diundang langsung ke

Gedung Sate oleh Ridwan Kamil bersama kedua orangtuanya, pada Selasa (26/9).

Rizki mengaku senang saat Gubernur Ridwan Kamil, memberikan peralatan sekolah baru untuknya. Ayah Rizki bernama Hendra dan ibunya bernama Novi turut mendampingi.

Rizki yang bersekolah di salah satu SD di Baleendah, Kabupaten Bandung menjadi korban perundungan diejek teman sekolahnya karena korban seringkali memakai seragam yang sama berulang kali karena tidak memiliki seragam baru.

Bahkan sepatu dan tas yang sering dipakainya itu merupakan pemberian dari orang lain. “Kami sekluarga dalam kesulitan ekonomi,” ujar Hendra.

Gubernur Ridwan Kamil saat memberikan bantuan kepada Rizki memberikan pesan agar Rizki tetap semangat untuk belajar dan terus bersekolah. Kepada orang tua Rizki, Hendra, Gubernur Ridwan Kamil berjanji akan memberikan pekerjaan. “Saya kasih kerjaan, yang penting halal dan dapat penghasilan,” ujar Kang Emil.

Selain itu, ibunya Rizki juga dijanjikan Kang Emil akan dibuatkan tempat usaha untuk berjualan makanan disekitar rumahnya, agar kedepannya bisa mendapatkan penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari.

Sementara itu, Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM, dr Siska Gerfiantti mendukung penuh pembentukan satgas anti perundungan.

Saat ini, pihaknya bersama JQR pihaknya tengah membuat formula kolaborasi untuk efektivitas satgas. ● **pur**

JERAT IBU HAMIL LEWAT MEDSOS

Jual Anak Bayi Rp15 Juta, Pemilik Yayasan ‘Ayah Sejuta Anak’ Diringkus

CISEENG (IM)- Suhendra, pemilik Yayasan ‘Ayah Sejuta Anak’ diamankan Sat Reskrim Polres Bogor. Suhendra dikenakan pasal Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) karena dianggap menjual anak bayi yang baru lahir dengan harga Rp15 juta.

Dalam modusnya, Suhendra dengan lembaga yayasannya yang bernama Ayah Sejuta Anak mengumpulkan ibu hamil yang rata-rata tidak ada bapaknya, lalu secara ilegal melakukan adopsi dan mengenakan biaya persalinan sebesar Rp15 juta kepada calon orang tua yang mau mengadopsi bayi malang tersebut.

“Sat Reskrim Polres Bogor berhasil menangkap kasus atau perkara TPPO. Kepolisian dalam kasus ini menangkap satu orang pelaku bernama Suhendra karena secara ilegal melakukan adopsi dan meminta uang Rp15 juta kepada calon orang tua yang mau mengadopsi anak bayi tersebut,” kata Kapolres Bogor, AKBP Iman Imanuddin kepada wartawan, Rabu (28/9).

AKBP Iman Imanuddin menerangkan bahwa Suhendra akan disangka dengan pasal 83 juncto 67 F Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan pasal 2 Undang-Undang nomor 21 Tahun 2007 tentang perberantasan TPPO.

“Tersangka Suhendra terancam hukuman penjara minimal 3 tahun, maksimal 15 tahun penjara dan denda minimal Rp 60 juta hingga maksimal Rp 300 juta,” terang AKBP Iman Imanuddin.

Untuk mencari ibu hamil dan orang tua yang akan mengadopsi anak bayi, Suhendra tutur alumni Akpol Tahun 2002 ini memanfaatkan sosial media miliknya. “Ibu hamil rata-rata dari luar Kabupaten Bogor, sementara calon orang tua yang akan mengadopsi anak bayi berasal dari Provinsi Lampung,” tuturnya.

Dari pengungkapan tersebut, Polisi berhasil menyelamatkan 5 orang ibu hamil yang sedang menunggu kelahiran dari tempat penampungan mereka tersebut. “Saat ini kelima orang ibu hamil tersebut sudah diserahkan ke dinas sosial Pemerintah Kabupaten Bogor untuk diberikan perlindungan dan penanganan sampai dengan yang bersangkutan melahirkan anaknya,” bebernya.

Sementara itu satu orang yang sudah diadopsi secara ilegal atau dijual oleh pelaku ke wilayah Lampung juga berhasil kita selamatkan dan saat ini anaknya tersebut diserahkan ke dinas sosial Kabupaten Bogor.

Kasat Reskrim Polres Bogor, AKP Siswo De Cuellar Tarigan menjelaskan bahwa ibu kandung anak bayi dan calon orang tua adopsi tidak dijadikan tersangka oleh jajarannya. “Tersangka hanya Suhendra, ibu anak bayi tidak mengetahui kalau

anaknya dijual, sementara calon orang tua adopsi hanya berniat membantu biaya persalinan di rumah sakit, sedangkan biaya persalinan sudah ditanggung dengan BPJS Kesehatan karena ibu anak bayi tersebut merupakan peserta BPJS,” jelas AKP Siswo De Cuellar Tarigan.

Tak Punya Izin

Yayasan ‘Ayah Sejuta Anak’ menjalankan proses adopsi secara ilegal. Selain tidak memenuhi prosedur, yayasan yang dimiliki Suhendra itu pun tak mengantongi izin alih asuh anak dari Dinsos Jabar.

Sub Kordinator Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial, Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bogor, Dudi Wigena mengatakan proses adopsi yang dilakoni Yayasan ‘Ayah Sejuta Anak’ itu ilegal. Sebab, tak memiliki izin alih asuh anak. “Yayasan ‘Ayah Sejuta Anak’ tidak memiliki izin dari Dinsos Jabar sebagai lembaga yang mengurus izin alih asuh anak. Artinya, proses adopsi mereka dilakukan secara ilegal,” kata Dudi Wigena kepada wartawan, Rabu (28/9).

Dudi menuturkan, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan adopsi anak, dalam permohonan izin alih asuh anak itu akan ada kunjungan dari tim Dinas maupun Kementerian untuk melihat kelayakan calon orang tua asuh. ● **gio**



Kapolres Bogor, AKBP Iman Imanuddin saat menggelar jumpa pers.

Bayi Masih Hidup Ditemukan Warga di Atas Tumpukan Sampah

BOGOR (IM)- Warga Jalan Abesin, Kelurahan Cibogor, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor digegerkan dengan temuan bayi di tempat sampah. Bayi tersebut sementara dibawa ke Dinas Sosial Kota Bogor.

Kasubsis PID Polresta Bogor Kota, Ipda Asep Herdianto mengatakan bayi itu ditemukan pukul 13.30 WIB pada Selasa 27 September 2022. Awalnya, ada tukang servis kulkas mendengar tangisan bayi.

“Tukang servis itu melaporkan kepada pemuda yang ada di sekitar dan para pemuda mel-

apor kepada ibu RT,” kata Asep dalam keterangannya, (28/9).

Bayi tersebut ditemukan tergeletak di atas tumpukan sampah dekat semak-semak. Kondisinya masih hidup lengkap masih lengkap dengan ari-arynya.

“(Kondisi bayi) masih hidup, ibu RT membawa langsung ke bidan,” jelasnya.

Saat ini, polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mencari orangtua bayi yang tega membuang buah hatinya itu. Untuk bayi, sementara ini akan diserahkan ke Dinas Sosial Kota Bogor. ● **gio**